BAB V

Kesimpulan

Setelah runtuhnya Uni Soviet, Rusia kemudian mengalami masa transisi baik didalam negeri maupun dalam menentukan prioritas politik luar negerinya. Rusia yang tidak lagi memproyeksikan politik luar negerinya dalam skala global kecuali dalam hal pelucutan senjata, mulai membangun hubungan kemitraan dengan Amerika Serikat dan Eropa Barat, mengalami perubahan ideologi, dan pendekatan pragmatisme. Dengan kebijakan luar negeri yang seperti ini, maka Rusia mulai melakukan peninjauan akan hubungannya dengan berbagai negara didunia. Saat ini Rusia sebagai pewaris utama dari sisa kedikdayaan Uni Soviet pada masa perang dingin, telah bertransformasi menjadi salah satu kekuatan militer dan ekonomi yang sangat diperhitungkan dan bahkan dianggap sebagai saingan utama dari kedikdayaan Amerika Serikat di dunia.

Fase kebangkitan Rusia dimulai pada akhir tahun 1990-an, Vladimir Putin yang terpilih untuk menggantikan Boris Yeltsin sebagai Presiden Rusia, berusaha mengejar kebijakan luar negeri Rusia yang lebih mengedepankan peranpenting Rusia di dunia. Dalam sebuah dokumen resmi kebijakan politik luar negeri Rusia,terutama dalam *Foreign Policy Concept dan The National Security Concept*,menggambarkan bahwa kebijakan luar negeri Rusia akan terus terfokus untuk menciptakan dan mempertahankan sistem internasional dimana negara-negara besartetap menjadi pemimpin dalam tatanan global, bebas mengejar kepentingan nasionalyang ingin dicapai, menghargai negara-negara dalam koridor

spere of influence, danmempertahankan *balance of power* diantara negara-negara besar yang ada.

Perkembangan Rusia yang sangat cepat ini kemudian berdampak pada kebijakan-kebijakan luar negeri Rusia yang cenderung semakin agresif dalam merespon berbagai tindakan barat yang berhubungan dengan kawasan Eropa Timur.

Sikap agresif Rusia terhadap beberapa negara-negara eks-Uni Soviet di wilayah Eropa Timur sangat tidak sesuai dengan arah kebijakan dan tujuan luar negeri Amerika Serikat di Eropa yang notabenya adalah negara dengan hegemoni yang sangat besar dan juga otak dari NATO sebagai organisasi keamanan yang berbasis di Eropa.

Dalam *U.S. National Security Strategy of Engagement and Enlargement* disebutkan bahwa kepentingan nasional AS di kawasan Eropa adalah:

1. Ikut menciptakan kawasan Eropa yang stabil dan aman melalui kerjasama dan kekuatan militer.
2. AS ingin mendapatkan akses di pasar ekonomi Eropa.
3. Mendukung pertumbuhan demokrasi dan kebebasan individu di Eropa Tengah dan Timur.

Tujuan jangka panjang yang akan dicapai AS sesuai dengan apa yang disebutkan dalam *U.S. National Security Strategy of Engagement and Enlargement* tersebut adalah AS ingin menciptakan dunia yang tidak saja aman, namun lebih baik yang bertujuan untuk menciptakan kebebasan ekonomi dan

politik, hubungan yang selaras dengan negara lain dan penghargaan pada nilai-nilai kemanusiaan. Untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya AS akan bekerjasama dengan pihak lain untuk menghindari konflik regional, menciptakan era baru bagi pertumbuhan ekonomi global lewat pasar dan perdagangan bebas, dan lain-lain.

Sehingga secara garis besar pada masa setelah berakhirnya Perang Dingin pemerintah AS memiliki beberapa tujuan politik luar negeri AS yang ingin dijalankan yakni :

1. Untuk mempertahankan AS, warga negaranya di dalam maupun luar negeri, para sekutu AS dari berbagai bentuk serangan langsung.
2. Untuk mencegah timbulnya agresi yang dapat mengganggu perdamaian internasional.
3. Untuk mempertahankan kepentingan ekonomi AS.
4. Untuk mempertahankan dan menyebarluaskan nilai-nilai demokrasi.
5. Untuk mencegah proliferasi senjata nuklir.
6. Untuk menjaga rasa percaya dunia internasional terhadap AS. Untuk itu AS harus selalu mempertahankan komitmen-komitmen internasionalnya.
7. Memerangi kemiskinan, kelaparan serta pelnggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

NATO sebagai sebuah organisasi keamanan di Eropa memiliki peran yang sangat vital bagi Amerika Serikat untuk terus berusaha membendung setiap aksi dan kebijakan-kebijakan agresif Rusia. Dengan posisinya sebagai penyumbang

dana terbesar bagi NATO (sekitar 73% lebih), Amerika Serikat memiliki posisi yang sangat kuat dalam pelembagaan NATO untuk setiap proses pengambilan keputusan dan operasi militer. Telah menjadi rahasia umum bahwa setiap kebijakan yang diambil NATO merupakan kelanjutan dari kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat.

Kebijakan ekspansi NATO pasca Perang Dingin yang berdasarkan pada *Study on Enlargement* di tahun 1995 yang mengidentifikasi kebutuhan NATO dalam memperluas dirinya, sebenarnya membawa kepentingan yang besar bagi Amerika Serikat sebagai penggerak utama organisasi ini. Kebijakan "pintu terbuka" bagi negara mana saja di Eropa untuk bergabung dalam organisasi ini sebenarnya adalah salah satu strategi yang ingin dicapai oleh Amerika Serikat untuk memperkuat dan memperluas hegemoninya melalui aliansi militer yang besar.

Selain itu, kebijakan perluasan NATO ini lebih terlihat sebagai salah satu upaya Amerika Serikat untuk menghalangi Rusia untuk membentuk sebuah aliansi militer baru yang akan diisi oleh negara-negara bekas Uni Soviet dan negara-negara lain di kawasan Eropa Timur. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana NATO kemudian dengan cepat melakukan pendekatan-pendekatan yang intensive kepada negara-negara di Eropa Timur yang pada akhirnya memilih untuk bergabung menjadi anggota NATO, antara lain Republik Ceko, Hungaria, Polandia, Bulgaria, Rumania, Slovakia, Slovenia dan tiga negara Baltik yaitu Lithuania, Latvia dan Estonia, serta Albania dan Kroasia.

Selain itu, terkait dengan sikap agresif Rusia terhadap Ukraina, Sekjen Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), Anders Fogh Rasmussen menyatakan bahwa NATO akan mempersiapkan program pertahanan baru.Rasmussen seraya mengisyaratkan statemen terbaru Perdana Menteri Inggris, David Cameron terkait krisis Ukraina dan hubungan dengan Rusia menekankan, intervensi Moskow di Kiev sebuah peringatan dan akan menciptakan kondisi keamanan baru di Eropa.Rasmussen mengungkapkan bahwa "*Kami akan memperkuat latihan militer dan kami akan mempersiapkan program pertahanan baru. Saya secara pribadi akan mendorong negara-negara anggota NATO untuk menambah investasi mereka di bidang pertahanan,*". Sekjen NATO ini menambahkan, selama lima tahun lalu, Rusia telah menambah anggaran pertahanannya hingga 50 persen dan negara-negara NATO rata-rata mengalami penurunan 20 persen di bidang anggaran pertahanan.

Pengambilan sikap para negara anggota NATO terhadap Rusia menjadi perhatian utama seluruh peserta pertemuan NATO di Wales pada tanggal 5 September 2014 lalu. Dalam pertemuan tersebut Moskow dikritik keras oleh seluruh anggota NATO karena dituduh melakukan invasi militer ke Ukraina tenggara dan menganeksasi Krimea.Salah satu poin penting dari pertemuan di Wales tersebut adalah deklarasi akhir, yang berisi pengesahan pembentukan pasukan militer gerak cepat NATO sebagai jawaban atas apa yang disebut-sebut "ancaman Rusia".NATO mendefinisikan pasukan gerak cepat ini sebagai "sarana pencegahan rencana destabilisasi negara-negara Baltik oleh Rusia". Negara-negara Baltik adalah negara-negara pecahan Uni Soviet yang terletak di sekeliling

Laut Baltik, yaitu sebuah kawasan di Eropa Utara yang mencakup Estonia, Latvia dan Lithuania.

Kesimpulan akhir yang dapat diambil dari penjelasan dalam skripsi ini adalah bahwa setiap operasi militer dan kebijakan yang dilakukan NATO terkait dengan wilayah Eropa Timur memiliki tujuan tersembunyi untuk mencapai kepentingan dan tujuan Amerika Serikat di wilayah Eropa. Kesediaan Amerika Serikat untuk menanggung lebih dari 73% beban anggaran NATO bukan semata-mata untuk membantu organisasi ini untuk menciptakan perdamaian di Eropa, tapi langkah Amerika Serikat ini memiliki tujuan yang lain yaitu agar NATO dapat digunakan untuk membendung dan mengatasi kebangkitan ekonomi dan militer Rusia yang sangat berpotensi untuk mengganggu posisi Amerika Serikat sebagai negara adidaya di dunia.